



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.05.2.065135/2025**



A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Provinsi : (06) ACEH
- 4. Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO
- Sebesar : Rp. 35.009.622.000 (TIGA PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	28.606.804.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	6.402.818.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 35.009.622.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

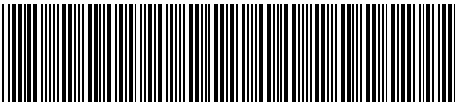
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025

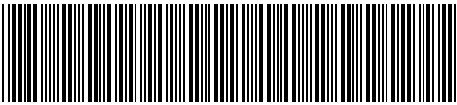


DS:3009-1900-5660-0041

Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	20.246.700.000
HB.2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Rp.	18.055.548.000
HB.2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	Rp.	256.615.000
HB.2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	1.634.537.000
HB.2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Rp.	300.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	14.762.922.000
WA.2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	14.762.922.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA



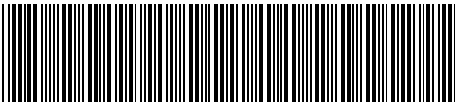
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Halaman : I A. 1

Program	:	032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				20.246.700.000
Kegiatan	:	2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP				18.055.548.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kinerja operasi pesawat patroli				
		2. 01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP				
		3. 02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas				
		4. 02	Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan				
		5. 03	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP				
		6. 03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas				
		7. 04	Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas				
		8. 04	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP				
		9. 05	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	85,00	Operasi	14.673.548.000
Rincian Output	:	01	QHD.001	Operasi Kapal Pengawas (PN)	65.00	Operasi	14.063.328.000
		02	QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas (PN)	20.00	Operasi	610.220.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1,00	Unit	1.550.000.000
Rincian Output	:	01	RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun (PN)	1.00	Unit	1.550.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10,00	Unit	1.832.000.000
Rincian Output	:	01	RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat (PN)	10.00	Unit	1.832.000.000
Kegiatan	:	2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan				256.615.000
	:	1. 01	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA

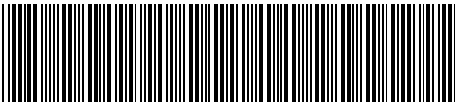


DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan					
	2.	01	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan		
	3.	01	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
	4.	01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran		
	5.	02	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan		
	6.	02	Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif		
	7.	02	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa		
	8.	03	Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain		
	9.	03	Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan		
	10.	04	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan		
	11.	04	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan		
	12.	05	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif		
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2351.AEA	Koordinasi	1,00 kegiatan 50.000.000
Rincian Output		:	01	AEA.002 Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	1.00 kegiatan 50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2351.BCE	Penanganan Perkara	4,00 Perkara, Berkas Perkara 206.615.000
Rincian Output		:	01	BCE.U03 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	3.00 Perkara 90.240.000
		:	02	BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	1.00 Perkara 116.375.000
Kegiatan		:	2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.634.537.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01 Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	
		:	2.	01 Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan	
		:	3.	01 Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA

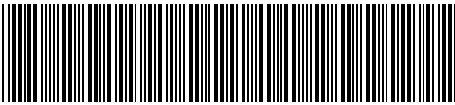


DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
	4. 01	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI			
	5. 01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
	6. 01	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan			
	7. 02	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan			
	8. 02	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan			
	9. 02	Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani			
	10. 02	Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP			
	11. 02	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan			
	12. 03	Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU			
	13. 03	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan			
	14. 03	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan			
	15. 03	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan			
	16. 04	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan			
	17. 04	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2352.999	Output Cadangan	1,00 cadangan 496.667.000
Rincian Output		:	01	999.999	496.667.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	2,00 Operasi 186.537.000
Rincian Output		:	01	BHD.001 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1.00 Operasi 124.747.000
		:	02	BHD.002 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1.00 Operasi 61.790.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA



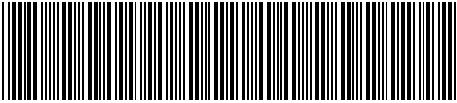
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	2,00	Hektar, Laporan	30.000.000
Rincian Output		:	01 BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	2.00	Laporan	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	65,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	921.333.000
Rincian Output		:	01 QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (PN)	25.00	Lembaga	468.000.000
		:	02 QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (PN)	40.00	Lembaga	453.333.000
Kegiatan		:	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan			300.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas			
		:	2. 01	Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
		:	3. 01	Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan penganan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan			
		:	4. 01	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan			
		:	5. 02	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas			
		:	6. 02	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3,00	Kelompok Masyarakat	300.000.000
Rincian Output		:	01 QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (PN)	3.00	Kelompok Masyarakat	300.000.000
Program		:	032.05.WA	Program Dukungan Manajemen			14.762.922.000
Kegiatan		:	2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			14.762.922.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP			
		:	2. 03	Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran			
		:	3. 04	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP			
		:	4. 05	Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA



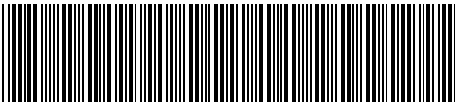
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 5. 06 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP
- 6. 07 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP
- 7. 09 Nilai PMSAKIP Ditjen PSDKP
- 8. 11 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP
- 9. 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
- 10. 13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PSDKP
- 11. 14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
- 12. 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP
- 13. 16 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP
- 14. 17 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
- 15. 18 Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP
- 16. 19 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- 17. 20 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP
- 18. 21 Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP
- 19. 22 Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK
- 20. 23 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
- 21. 24 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP
- 22. 25 Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP
- 23. 26 Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP
- 24. 27 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
- 25. 28 Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP
- 26. 29 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
- 27. 30 Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA

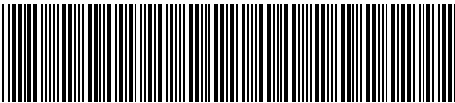


DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
	28.	31	Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP						
	29.	32	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP						
	30.	33	Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP						
	31.	35	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00	Unit			112.000.000
Rincian Output		:	01	CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.00	Unit			112.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			13.639.303.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	3.00	Layanan			22.000.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan			23.300.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan			40.871.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan			489.973.000
		:	05	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan			24.556.000
		:	06	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan			13.038.603.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34,00	Unit, m2, Paket			170.268.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	34.00	Unit			170.268.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	71,00	Orang, Layanan, Rekomendasi			170.411.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	71.00	Orang			170.411.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Klasifikasi Rincian Output	5	:	2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	670.940.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	187.936.000
			02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	178.260.000
			03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	75.760.000
			04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	191.710.000
			05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	37.274.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
I B. SUMBER DANA

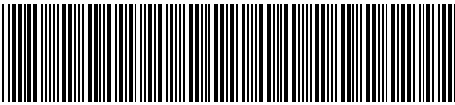


Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	35.009.622.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	28.606.804.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	6.402.818.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



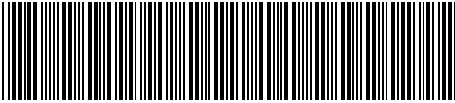
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	8.499.112	24.611.517	1.898.993	-	-	35.009.622	06 . 51	
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	-	18.629.975	1.616.725	-	-	20.246.700		
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	-	16.516.823	1.538.725	-	-	18.055.548		
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	14.673.548	-	-	-	14.673.548		
01	RM	-	8.270.730	-	-	-	8.270.730		
04	PNBP	-	6.402.818	-	-	-	6.402.818		
2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	71.275	1.478.725	-	-	1.550.000		
01	RM	-	71.275	1.478.725	-	-	1.550.000		
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	1.772.000	60.000	-	-	1.832.000		
01	RM	-	1.772.000	60.000	-	-	1.832.000		
2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	-	256.615	-	-	-	256.615		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

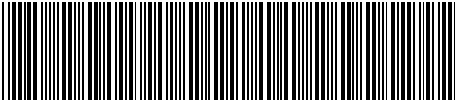
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2351.AEA	Koordinasi (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	50.000	-	-	-	50.000	06 . 51	
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	001@	
2351.BCE	Penanganan Perkara (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	206.615	-	-	-	206.615	06 . 51	
01	RM	-	206.615	-	-	-	206.615	001@	
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	1.556.537	78.000	-	-	1.634.537		
2352.999	Output Cadangan (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	496.667	-	-	-	496.667	06 . 51	
01	RM	-	496.667	-	-	-	496.667	001@	
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	186.537	-	-	-	186.537	06 . 51	
01	RM	-	186.537	-	-	-	186.537	001	

DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO
Kewenangan : (KD)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



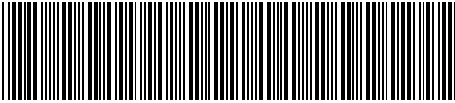
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	-	112.000	-	-	112.000	06 . 51	
01 RM		-	-	112.000	-	-	112.000	001	
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	8.499.112	5.140.191	-	-	-	13.639.303	06 . 51	
01 RM		8.499.112	5.140.191	-	-	-	13.639.303	001@	
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	-	170.268	-	-	170.268	06 . 51	
01 RM		-	-	170.268	-	-	170.268	001	
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	170.411	-	-	-	170.411	06 . 51	
01 RM		-	170.411	-	-	-	170.411	001@	
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (06.51 ACEH / KOTA BANDA ACEH)	-	670.940	-	-	-	670.940	06 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	670.940	-	-	-	670.940	001@	
JUMLAH		8.499.112	24.611.517	1.898.993	-	-	35.009.622		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

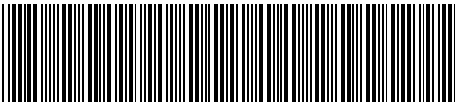
Provinsi : (06) ACEH

Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

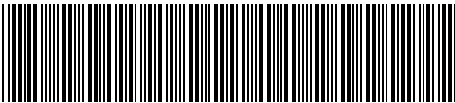
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	032.05.WA.2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	731.444	1.212.854	1.487.694	1.204.826	1.204.826	1.205.916	1.209.930	1.204.826	1.204.826	1.207.290	1.204.826	1.683.664	14.762.922
		51 BELANJA PEGAWAI	295.000	708.249	708.249	708.249	708.249	708.249	708.249	708.249	708.249	708.249	708.249	1.121.622	8.499.112
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	436.444	504.605	497.177	496.577	496.577	497.667	501.681	496.577	496.577	499.041	496.577	562.042	5.981.542
		53 BELANJA MODAL	0	0	282.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.268

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
IV A. B L O K I R



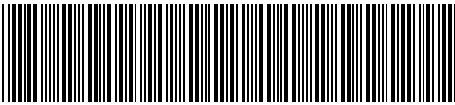
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [065135] PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
065135 032.05.HB 2350 2350.QHD 2350.RBQ	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	2350.RCG 2351 2351.AEA 2351.BCE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.214
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 8.915.947		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	52 Belanja Barang Rp. 8.915.947		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96
	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.114.879		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 216.628		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.311		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri Keuangan terkait pagu PNBP		2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Koordinasi
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 446.464		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.288
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 102
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		2351.BCE Penanganan Perkara
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.600

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
IV A. B L O K I R



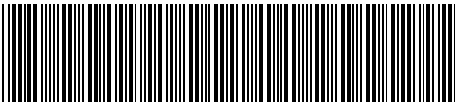
DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [065135] PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2352 2352.999	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet	2352.BII	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 152.690
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.620
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK
	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Output Cadangan		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 185.790
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.780		Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.784
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
2352.QIC	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	2352.QIC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.187		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 168
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM)		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.200		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 557.240
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2352.QIC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.400		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.093
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
IV A. B L O K I R



DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [065135] PANGKALAN PSDKP LAMPULO

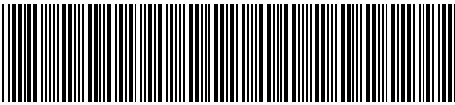
Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.312		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 243.449
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.020		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 216
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 374.316		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 168		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 133.872		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.05.2.065135/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3009-1900-5660-0041

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [065135] PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal PSDKP

ttd.
Pung Nugroho Saksono
196904221992031002